

# REPOSISI PERAN DAN FUNGSI PEREMPUAN

**Arbaiyah Prantiasih**

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Malang

Jl. Semarang No.5 Malang

email:arbaiyah.prantiasih.fis@um.ac.id

**Abstract:** Women empowerment effort is an integral part of national development. Therefore, women empowerment effort is an on-going attempt in accordance to the dynamics of rapid economic and social culture changes in this modern era. The targets of women empowerment are to develop women's potentials which enable them to take the benefit of their right and opportunities the same as men do; and to use their right and potentials the same as men do on development resources. In this way, women can develop their own capacity for actualizing their roles as men's equals partners for family and state development. Due to the equal duties and obligations in facing global challenge, women must play their domestic and public roles equally.

**Abstrak:** Upaya pemberdayaan perempuan adalah bagian integral dari upaya pembangunan nasional. Oleh karenanya upaya untuk memberdayakan perempuan merupakan upaya yang berkelanjutan sesuai dengan dinamika perubahan sosial budaya ataupun ekonomi yang berlangsung secara cepat dalam era global ini. Sasaran program pemberdayaan perempuan atau *empowerment of women* diarahkan untuk mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi yang ada pada diri perempuan yang memungkinkan untuk memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki, serta untuk memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama terhadap sumber daya pembangunan. Dengan kondisi ini perempuan Indonesia akan dapat mengembangkan kapasitas dirinya untuk aktualisasi perannya sebagai mitra sejajar laki-laki dalam pembangunan keluarga dan bangsa. Oleh sebab itulah dengan kesetaraan tugas dan kewajiban yang diperankan maka dalam menghadapi tantangan global perempuan Indonesia harus memerankan peran domestik dan publik secara seimbang.

**Kata kunci:** Reposisi, peran dan fungsi perempuan

Pelbagai perspektif yang bias gender dalam pelaksanaan pembangunan selama ini perlu dikoreksi. Agar visi dan misi serta tujuan dan sasaran pemberdayaan perempuan diarahkan untuk tetap mempertahankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan. Semua ini harus dilakukan dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Di dalam merealisasikan upaya tersebut, pemerintah mempunyai komitmen yang sungguh-sungguh untuk merealisasikan kesetaraan gender (*gender equality*), dengan terciptanya kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan, ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan serta mendapat perlakuan yang sama dalam menikmati pembangunan.

Oleh sebab itu apabila kesetaraan gender dapat dinikmati maka akan tumbuh apa yang kita sebut "keadilan gender (*gender equality*)", yang merupakan suatu kondisi dan perlakuan keadilan terhadap perempuan dan laki-laki, iktiar keadilan terhadap perempuan dan laki-laki terwujud, maka diperlukan langkah-langkah untuk menghentikan hal-hal yang secara psikis, politik dan sosial budaya yang menghambat perempuan dan laki-laki untuk bisa berperan dan menikmati hasil dari peranannya itu. Untuk itu bagaimana mensinergikan kebijakan kesetaraan dan keadilan gender secara integral dalam pembangunan sesungguhnya adalah sebuah keniscayaan. Sebab berangkat dari kenyataan, bahwa peran perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya, politik, hukum dan ekonomi masih rendah. Hal inilah berakibat pada rendahnya kualitas hidup perempuan.

Rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan berakibat pada rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang perekonomian. Hal ini dapat ditunjukkan oleh masih rendahnya peluang yang dimiliki perempuan untuk bekerja dan berusaha, serta rendahnya akses mereka terhadap pemberdayaan ekonomi seperti teknologi, informasi, pasar, modal kerja. Meskipun penghasilan perempuan pekerja memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap penghasilan dan kesejahteraan keluarga, akan tetapi perempuan masih dianggap sebagai pencari nafkah tambahan dan pekerja keluarga. Semua anggapan ini berdampak pada masih rendahnya partisipasi, akses dan manfaat yang dinikmati perempuan dalam pembangunan. Meskipun dalam UUD tahun 1945 pasal 27 menjamin kesamaan hal bagi seluruh warga negara dihadapan hukum, baik laki-laki maupun perempuan, namun masih banyak dijumpai materi hukum yang diskriminatif terhadap perempuan dan tidak berkeadilan gender.

Masalah penting lain adalah struktur yang terdapat dalam masyarakat yang masih kurang mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Seperti contohnya pada UU Perkawinan, UU Ketenagakerjaan, UU Kesehatan dan sebagainya. Keadaan ini masih rendahnya kesadaran gender di kalangan penegak hukum yang menangani kasus-kasus ketidakadilan bagi perempuan, dan lemahnya mekanisme pemantauan dan evaluasi, terutama yang dilakukan oleh masyarakat, terhadap pelaksanaan penegak hukum. Sementara itu, budaya hukum dalam masyarakat yang kurang menunjang terciptanya keadilan gender antara lain ditandai oleh masih rendahnya kesetaraan masyarakat tentang hukum, disamping itu juga masih terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi dan sumber daya hukum serta belum optimalnya peran media massa dalam mensosialisasikan produk hukum kepada masyarakat.

### **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN PERANANNYA DALAM KELUARGA**

Dalam upaya mempercepat proses pembangunan nasional, maka ikhtiar dan program pemberdayaan perempuan tidaklah dapat diabaikan. Jumlah perempuan yang mencapai kurang lebih 55,3 persen dari total penduduk Indonesia dengan kualitas yang terus meningkat patut

diperhatikan setiap kebijakan pembangunan. Partisipasi aktif antara laki-laki dan perempuan secara seimbang akan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan. Dalam beberapa aspek pembangunan, perempuan kurang dapat berperan aktif. Hal ini dikarenakan oleh kondisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan laki-laki, seperti peluang dan kesempatan yang terbatas dalam mengakses sumber-sumber ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia, sistem upah yang masih diskriminatif, serta tingkat pendidikan yang kurang memadai.

Sesungguhnya tingkat usia produktif bagi perempuan lebih banyak daripada laki-laki, namun tingkat partisipasi dan penyerapan tenaga kerja perempuan maupun kegiatan ekonomi mandiri lebih rendah daripada laki-laki. Akses perempuan terhadap kesempatan dan sumberdaya yang mampu mempengaruhi struktur ekonomi dalam masyarakat sangat rendah. Dalam sektor informal lebih banyak memilih di bidang perdagangan bahan pangan, pertanian produksi skala kecil dan sebagainya.

Rendahnya tingkat pendidikan dalam keterampilan perempuan sebagai akibat segregasi gender dalam budaya kita menyebabkan berbagai diskriminasi terhadap perempuan dalam aktivitas ekonomi. Sebagai dampaknya nilai pekerjaan perempuan masih dianggap rendah daripada laki-laki yang tercermin dalam perbedaan upah yang diterima. Demikian juga keterbatasan pendidikan mempengaruhi perempuan di dunia kerja hanya menempatkan perempuan pada posisi marginal dan tidak memiliki daya tawar (*bargaining position*), misalnya dalam sektor industri perempuan banyak bekerja sebagai buruh kasar, buruh lepas dengan upah rendah tanpa jaminan sosial yang memadai.

Kenyataan di atas menggambarkan bahwa hak-hak perempuan untuk mengaktualisasikan potensi dirinya dan untuk memperoleh akses berbagai segi terutama di bidang ekonomi belum menggembirakan. Perjuangan untuk memberi pemahaman dan kesadaran akan kesetaraan dan keadilan gender lewat berbagai kebijakan dan peraturan yang mendiskreditkan perempuan hingga hak asasi manusia untuk memperoleh kesempatan bekerja dan beraktivitas menjadi terbuka harus ditingkatkan dan terus menerus disosialisasikan.

Ada beberapa alternatif pemecahan alternatif pemecahan ditinjau dari perspektif gender (Parawansa, 2006: 72) yaitu: (1) pertama harus

ada jaminan konstitusional dari parlemen dan negara tentang persamaan upah perempuan dan laki-laki, pemberian hak untuk memperoleh akses dan menghilangkan peraturan yang mendiskriminasi perempuan, (2) kedua, dari aspek pendidikan harus mendiseminasi informasi yang mereka butuhkan, mengembangkan tenaga kerja dan informasi, serta memastikan perempuan miskin untuk memperoleh akses terhadap pelatihan di tempat kerjanya. Mengembangkan kebijakan terutama dalam pendidikan untuk mengubah perilaku yang memperkuat pembagian kerja secara gender, (3) ketiga, peran domestik asumsinya hanya tugas kaum perempuan. Oleh karena itu ketika perempuan bekerja di luar publik beban pekerjaannya semakin berat.

Dengan demikian perlu dikembangkan pendidikan dengan konsep tanggung jawab bersama untuk keluarga dan pekerjaan rumah tangga, terutama yang berhubungan dengan pendidikan anak. Apabila perempuan masih dibebani dengan pekerjaan rumah tangga, maka perlu ditingkatkan akses mereka pada teknologi yang membantu pekerjaan rumah tangga sehingga memungkinkan mereka memperoleh pendapatan. Tugas untuk meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dan menciptakan kesetaraan dan keadilan gender dalam masyarakat di berbagai bidang serta meningkatkan kualitas keluarga Indonesia adalah merupakan amanat Undang-Undang.

Dalam kepentingan hal tersebut perlu diselenggarakan program pemberdayaan perempuan dan program nasional keluarga berencana yang bersifat multidimensional dan lintas sektoral yang dilaksanakan oleh kalangan eksekutif dengan mendapat dukungan kalangan legislatif yang makin peka gender dan sistem kekuasaan yang semakin terdesentralisasi dalam otonomi daerah. Hal ini penting agar pembangunan dapat berkelanjutan dengan melibatkan segenap potensi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Berbagai perspektif yang bias gender pelaksanaan pembangunan selama ini perlu dikoreksi, dengan maksud agar visi dan misi serta tujuan dan sasaran pemberdayaan perempuan diarahkan untuk tetap mempertahankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis dari perjuangan kaum perempuan. Hal itu semua dilakukan dalam upaya melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga.

Untuk merealisasikan hal tersebut, pemerintah mempunyai komitmen yang sungguh-sungguh untuk merealisasikan kesetaraan gender (*gender equality*), dengan terciptanya kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, sehingga mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan dan mendapat perlakuan yang sama dalam menikmati pembangunan.

Apabila kesetaraan gender dapat dinikmati akan dapat tumbuh “keadilan gender” atau *gender equity*” inilah merupakan suatu kondisi dan perlakuan keadilan terhadap perempuan dan laki-laki. Berangkat dari kenyataan, bahwa peran perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya, politik, hukum dan ekonomi masih rendah. Rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan berakibat pada rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang perekonomian. Sehubungan dengan itu ditunjukkan masih rendahnya peluang yang dimiliki perempuan untuk bekerja dan berusaha, serta rendahnya akses terhadap perempuan terhadap sumber daya ekonomi, seperti teknologi, informasi, pasar dan modal kerja. Hal ini berdampak pada masih rendahnya partisipasi, akses dan manfaat yang dinikmati perempuan dalam pembangunan.

Di era reformasi sekarang ini, penanganan pembangunan peranan perempuan perlu dibangun secara berkelanjutan agar lebih mampu menghadapi tantangan global dan tuntutan nasional yang semakin berkembang. Pemikiran tersebut terangkum dalam paradigma baru yang diharapkan mampu menggerakkan perubahan cara pandang, inspirasi langkah-langkah strategis dan konkrit dalam upaya pemberdayaan perempuan Indonesia di segala bidang kehidupannya. Paradigma baru itu merupakan paradigma dalam menatap fungsi dan peran perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara.

Pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi produktif keluarga dilaksanakan melalui penumbuhan minat dan motivasi di bidang usaha dengan proses pembelajaran yang terarah dan berkelanjutan melalui pendekatan kelompok. Upaya pemberdayaan dengan pendekatan kelompok ini diharapkan perempuan mampu mengembangkan potensinya dalam memanfaatkan berbagai bantuan dan peluang yang ada. Dengan menjadi anggota kelompok diharapkan akan timbul

rasa kebersamaan yang dapat mendorong proses belajar, pemecahan masalah serta mobilisasi sumber daya diantara anggota kelompok. Proses ini akan menjadikan perempuan mampu memanfaatkan segala peluang dan sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kualitas usaha ekonomi produktif yang dilaksanakan. Usaha pendekatan kelompok ini telah banyak dilakukan oleh instansi atau institusi baik pemerintah maupun oleh swasta, seperti program KUBE, program IDT dan sebagainya.

Upaya pemberdayaan perempuan dapat dikatakan sebagai upaya untuk meningkatkan kepemilikan dan kontrol perempuan terhadap sumber daya ekonomi maupun non ekonomi. Dalam rangka merealisasikan program pembangunan yang sensitif jender dan dalam rangka pemberdayaan perempuan, maka dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut (Muhadjir: 2005, 124):

- (1) Prioritas pada kelompok perempuan pedesaan karena potensinya yang belum dimanfaatkan secara optimal. Strategi ini diharapkan dapat menjadi stimulan bagi percepatan dan pemulihan ekonomi yaitu penyediaan fasilitas modal bagi para perempuan yang mengelola usaha baik kecil maupun menengah, terutama di pedesaan dan daerah pesisir atau nelayan. Peredaran uang di seluruh pelosok tanah air dalam jumlah yang memadai diharapkan dapat meningkatkan aktifitas ekonomi perempuan di pedesaan dan membantu perempuan untuk memasuki pasar melalui aktivitas pertukaran yang mempergunakan uang.
- (2) Pelaksanaan penyediaan modal bagi kelompok perempuan dan besarnya fasilitas modal yang dapat diakses diharapkan cukup memadai, sehingga tidak menutup kemungkinan terhadap pemanfaatan teknologi yang dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan oleh kelompok-kelompok usaha perempuan.
- (3) Meningkatkan sarana dan prasarana komunikasi pedesaan yang menunjang perluasan akses terhadap informasi baru yang lebih akurat bagi perempuan pengusaha kecil dan menengah. Informasi terkini yang akurat akan membantu masyarakat pedesaan untuk mengarahkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki bagi usaha produksi komoditas yang dapat memberikan imbalan memadai dan menguntungkan.

- (4) Optimalisasi peran seluruh sumber daya manusia perempuan diharapkan makin dapat mempercepat pemulihan ekonomi. Peningkatan perempuan dalam pasar diharapkan dapat meningkatkan kontribusi perempuan dalam ekonomi keluarga untuk meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga dan tingkat kesejahteraan masyarakat selain meningkatkan kualitas hidup perempuan.

Mengacu pada kondisi perempuan dalam bidang ekonomi dimana akses terhadap sumber daya ekonomi yang ada pada kenyataannya masih rendah dan mempertahankan potensi yang dapat dikembangkan maka perlu dikoordinasikan beberapa hal sebagai berikut: perlunya memberikan kesempatan pada perempuan yang mempunyai potensi baik dalam kelompok maupun perseorangan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui usaha ekonomi produktif. Hal inilah akan membuka kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan berkelanjutan kegiatan ekonomi produktif.

## **REPOSISI PERAN DAN FUNGSI PEREMPUAN**

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini dan masih berlanjut di masa depan serta perkembangan yang demikian hebat dan cepat sehingga pengaruh perkembangan tersebut terasa dalam segala bidang dan aspek kehidupan manusia. Pembangunan peran perempuan telah dilaksanakan lebih dari 35 tahun dan sudah banyak hasil yang dicapai misalnya peningkatan ragam peran yang dimainkan perempuan. Pada era millinium ketiga upaya mereposisi peran dan fungsi perempuan sangatlah tepat untuk lebih memacu mewujudkan cita-cita kesetaraan jender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Perkembangan bergerak begitu cepat sehingga menimbulkan perubahan-perubahan yang sangat cepat sehingga menimbulkan perubahan-perubahan yang sangat cepat dan sukar kita perkirakan sebelumnya. Pada era millinium ketiga, sangat diwarnai dengan perkembangan dan kemajuan di bidang iptek dan persaingan antar negara yang sangat tajam dan tanpa batas, menjadikan dunia ini menjadi sangat terbuka dan dengan kemajuan teknologi informasi yang telah

mendunia. Di era ini tentu mengandung peluang dan tantangan bagi kita semua untuk menjawab tantangan perubahan tersebut dengan kemauan dan kemampuan yang dimiliki sehingga dapat memanfaatkan peluang untuk bersaing dan bertahan.

Perempuan sebagai kelompok penduduk yang jumlahnya mayoritas ditantang untuk ambil bagian menghadapi perubahan yang terjadi di lingkungannya. Dampak lain dari globalisasi adalah adanya keterbukaan dan peningkatan peluang dan kesempatan bagi perempuan untuk berperan lebih luas. Hal ini dimungkinkan karena meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang memberi kesempatan pada perluasan kesempatan kerja, dan pengembangan potensi peran karena peningkatan dan kemajuan pendidikan perempuan. Perkembangan peningkatan kemampuan perempuan ini sudah barang tentu akan menimbulkan pergeseran nilai dan pola kehidupan keluarga. Sebagai contohnya, gejala yang akhir-akhir ini sangat menonjol adalah meningkatnya jumlah perempuan yang memilih bekerja bukan semata-mata tuntutan ekonomi akan tetapi karena ingin memuaskan kebutuhan pribadinya. Fenomena ini sebagai perwujudan keberhasilan program pendidikan yang secara langsung dan tidak langsung berpengaruh pada peningkatan aspirasi dan harapan perempuan akan penghasilan dan kehidupan yang lebih baik.

Demikian juga penduduk Indonesia, mempunyai posisi yang strategis mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah perempuan. Secara sosiologis, manusia merupakan makhluk bermasyarakat. Untuk itu, laki-laki dan perempuan merupakan makhluk masyarakat untuk membangun negeri. Beberapa kewajiban sosial yang diwajibkan bagi laki-laki maupun perempuan adalah memelihara kemanusiaan. Seluruh tanggung jawab sosial laki-laki dan perempuan adalah merupakan manifestasi sebagai pembawa amanah Allah SWT (Parawansa, 2006: 218). Bertolak dari pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa tanggung jawab sosial itu tidak boleh hanya terpusat pada laki-laki saja namun kaum perempuan juga mempunyai tanggung jawab sosial yang seimbang.

Oleh sebab itu dengan kesetaraan tugas dan kewajiban yang diperankan tersebut maka dalam menghadapi tantangan global perempuan Indonesia harus memerankan peran domestik dan publik secara seimbang. Untuk peran domestik, peran

perempuan melindungi keluarga khusus anak-anak dan anggota keluarga, terutama dalam mengatasi masuknya informasi global yang dengan bebasnya dikuatirkan akan membawa pengaruh negatif pada tata nilai keluarga. Perempuan dalam memainkan perannya di sektor domestik adalah memberikan perlindungan agar masuknya informasi bebas tersebut tidak akan merusak persembaian tata nilai keluarga. Oleh karenanya membangun dan menanamkan keimanan dan ketakwaan dan kebersamaan dalam tanggung jawab antara suami dan isteri dan anak-anak dalam keluarga secara baik agar dapat mewujudkan ketahanan keluarga yang kokoh.

Di sektor publik, banyak hal yang dapat diperankan oleh perempuan pada era global ini. Dengan terbukanya peluang dan kesempatan global maka terbuka pula peluang bagi partisipasi perempuan dalam bidang kegiatan yang dianggap kurang lazim dilaksanakan oleh perempuan pada saat sebelumnya. Perempuan mempunyai banyak pilihan yang menurut evaluasi pribadi akan sesuai dengan kemampuan dirinya dan akan bermanfaat untuk pribadinya, untuk keluarganya atau untuk masyarakatnya. Oleh sebab itulah permasalahan yang dihadapi dalam reposisi peran ini adalah bagaimana sebagai perempuan dapat melintasi sektor domestik ke sektor publik dan sebaliknya secara aman dan mantap, sebab sementara ini masyarakat bahkan kaum laki-laki belum sepenuhnya menyadari dan menerima proses reposisi peran ini dengan baik.

Untuk dapat memerankan diri secara seimbang di sektor domestik dan publik tentunya upaya untuk meningkatkan kualitas diri kaum perempuan dan perlu disertai penciptaan dukungan sistem sosial (*social support system*) yang memungkinkan perempuan dapat memenuhi tuntutan formal obyektif lingkungan kerja dan menunjukkan prestasi sedangkan di sektor domestik perempuan dapat membina interaksi sosial keluarganya secara imbang dalam suasana harmonis.

## SIMPULAN

Perjuangan menuju kemandirian perempuan dan keterlibatan perempuan dalam keputusan-keputusan publik sangat dipengaruhi oleh kemandirian ekonomi. Hal ini disebabkan ada pola ketergantungan perempuan terhadap kelangsungan kehidupannya pada laki-laki yang

akhirnya berimplikasi pada ketundukan yang merugikan dirinya. Oleh sebab itu upaya pemberdayaan perempuan merupakan upaya berkelanjutan sesuai dengan dinamika perubahan sosial-budaya atau ekonomi yang berlangsung secara cepat dalam era globalisasi. Upaya program penambahan pengetahuan dan profesionalitas perempuan merupakan tuntutan masa depan yang tidak bisa dielakkan lagi.

Untuk mengimbangi tantangan perkembangan jaman kemajuan dunia yang demikian

cepat dan kompetitif diperlukan adanya perubahan paradigma dalam pembangunan peran perempuan. Perubahan paradigma baru tersebut pada hakekatnya konsep pembangunan berwawasan gender. Sehingga diharapkan akan mampu menggerakkan perubahan cara pandang yang membangkitkan inspirasi dengan langkah strategis dan konkret dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas peranan perempuan Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN

- Brouwer, M.A.W. 1989. *Psikologi Fenomologi*. Jakarta: Gramedia
- Muhajir, Darwin, 2005. *Negara dan Perempuan: Reorientasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Wacana Kerjasama Penerbit Graha Guru
- Muhammad, K.H. Hussein. 2001. *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKIS kerjasama dengan Rahima
- Parawansa, Khofifah Indar. 2003. *Pemberdayaan Perempuan Melalui Rekonstruksi Pemahaman Agama*. Surabaya: Pusat Studi Gender (PSG) IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Parawansa, Khofifah Indar. 2006. *Mengukur Paradigma Menmbus Tradisi (Pemikiran Tentang Kesetaraan Gender)*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Suaedy, Ahmad. 2000. *Dari Pesantren ke Pemberdayaan Perempuan Indonesia, Indoensia Abad XXXI di Tengah Kepungan Perubahan Global*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.